

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perbandingan pengaturan sistem pengupahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi terhadap kesejahteraan kuli bangunan apabila dikaji sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Sistem pengupahan yang dilakukan Penyedia Jasa Konstruksi Dharma Architect terhadap kuli bangunan sudah memenuhi ketentuan mengenai sistem pengupahan pada Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan seperti komponen upah, dasar penentuan upah, struktur dan skala upah, upah lembur, upah tidak masuk kerja, struktur dan skala upah, hak pekerja atas keterangan upah, bentuk dan cara pembayaran upah.
2. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan terhadap kesejahteraan kuli bangunan masih dirasakan belum efektif, hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan sebuah peraturan seperti yang disyaratkan Soerjono Soekanto sebagian masih belum terpenuhi yaitu mengenai faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan sebuah hukum dan faktor kebudayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari Penyedia Jasa Konstruksi Dharma Architect karena kontraktor sebagai Pengusaha masih tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Tidak diketahuinya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang mengatur tentang pengupahan menimbulkan ketidakpahaman hukum dimana Pengusaha

tidak mengetahui apa hukum dan tujuan dari hukum terutama mengenai pengupahan. Ketidappahaman hukum tidak menimbulkan kesadaran hukum yang menyebabkan perilaku pengusaha tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dengan tidak dimilikinya kesadaran hukum dan pengetahuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan jadi tidak dapat dipatuhi oleh Pengusaha. Ketentuan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang tidak dipatuhi oleh Pengusaha sebagai target hukum menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menjadi kurang efektif.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Lembaga legislatif untuk merumuskan peraturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap sistem pengupahan bagi kuli bangunan, karena masih belum ada peraturan yang secara khusus mengatur dan melindungi kuli bangunan yang pekerjaannya bersifat spesifik sehingga tidak bisa disamakan dengan pekerjaan-pekerjaan kuli yang lain.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan arah kebijakan pengupahan yang memuat perlindungan pengupahan karena belum terdapat adanya pengaturan kebijakan secara khusus bagi kuli bangunan.
3. Disarankan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung untuk melakukan sosialisasi ketentuan tentang sistem pengupahan terhadap pemberi kerja dan kuli bangunan karena kurangnya pengetahuan para pihak dalam perjanjian kerja terutama mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan karena ketentuan pengupahan.

4. Disarankan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung untuk memberikan kegiatan pelatihan terhadap para pekerja terutama bagi pekerja kuli bangunan. Kegiatan pelatihan keterampilan dilaksanakan khusus dalam bidang pembangunan atau konstruksi yang dapat menambah keahlian pekerja kuli bangunan sehingga pemberi kerja berani untuk memberikan upah yang lebih baik bagi pekerja kuli bangunan apabila memiliki keterampilan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kuli bangunan.
5. Disarankan kepada Penyedia Jasa Konstruksi Dharma Architect agar lebih bisa mempelajari dan menerapkan ketentuan peraturan yang baru mengenai sistem pengupahan, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat menyebabkan pemberi kerja dikenakan sanksi hukum.
6. Disarankan kepada kuli bangunan agar dapat mempelajari ketentuan mengenai sistem pengupahan, agar dapat mengetahui hak-hak yang diperolehnya.
7. Disarankan kepada pengawas ketenagakerjaan dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pengupahan yang dilakukan terhadap kuli bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

BUKU

- Amin Tunggal Widjaya, Manajemen Suatu Pengantar, (Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta Jaya, 1993)
Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta, Indonesia: Ind-Hill-Co,1992)
Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
Chaster I Bernard, Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses, (Jakarta, Indonesia: Gramedia, 1992)
Francis Alappatt, Mahatma Ghandi Prinsip Hidup, pemikiran politik, dan konsep ekonomi, (Bandung, Indonesia: Nusamedia, 2005)
Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Di Indonesia, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains VI,
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung, Indonesia: Nusa Media, 2006)
Hasibuan S. P Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2015).
Jimly Asshidiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta, Indonesia: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006)

- Lawrence M. Freidman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System A Social Science Perspective* (Bandung, Indonesia: Nusamedia, 2009)
- M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Development* (International Institute of Islamic Thought and Islamic Reszearch Institute, 1989)
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Indoneisa: Rekana Cipta, 2001)
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum* (Bandung, Indonesia: Mandar Maju, 2001)
- Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung, Indonesia: Mandar Maju, 1998)
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta, Indonesia: Ghala Indonesia, 1990)
- Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta, Indonesia: Perkumpulan PraKana, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Indonesia: Rajawali, 2022)
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung, Indonesia: CV. Ramadja Karya, 1998)
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung, Indonesia: CV. Ramadja Karya, 1998)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta, Indonesia: Liberty, 1999)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Indonesia, 2014)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Indonesia: CV. Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Indonesia, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Indonesia, 2018)

Sumawinata Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Tim Redaksi Tammadun, *Parameter Kesejahteraan*, Majalah Tammadun 2008

W.J.S. Poerwadarminta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung, Indonesia: Mizan, 1996)

JURNAL

Andri Dharma, Tesis: *Hubungan Antara Interaksi Keluarga Dan Preferensi Tempat Tinggal Lansia Etnis Tionghoa Kelas Menengah Ke Atas Di Kota Bandung*, (Bandung: ITB, 2016)

Batanghari Jambi (Volume 20 Nomor 2 Tahun 2020)

Bockerman P. dan Maliranta M., *Outsourcing, Occupational Restructuring and Employee Well-being: Is There a Silver Lining?*, (Helsinki, 2012)

Devani Ariesta Sari. *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandar Lampung*, Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung Tahun 2016)

Jurnal Eksekutif (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021)

Mayararakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoreng Kabupaten Kepulauan Sangihe, Lusya Vivi Gorahe dan Fonny Waani, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan*

Mayararakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoreng Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Ririn Noviyanti Putri, *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Universitas

WEBSITE

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, Pandemi dan Pertumbuhan Ekonomi 2020, Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen) 2018-2019, <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/73/2/-supas-2015-tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html>. Diakses 28 Maret 2023 Pukul 14.26 WIB.
- Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html>. hlm. 121. Diakses 28 Maret 2023 Pukul 14.33 WIB.
- Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html>. hlm. 59. Diakses 28 Maret 2023 Pukul 14.50 WIB.
- Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html>. hlm. 57. Diakses 28 Maret 2023 Pukul 14.43 WIB
- Diakses 30 Juli 2023 Pukul 15.19.
- <https://blorakab.bps.go.id/news/2021/02/15/118/pandemi-dan-pertumbuhan-ekonomi-2020.html>. Diakses 19 Desember 2022 Pukul 18.56 WIB.
- <https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/#fungsi-hukum-menurut-satjipto-rahardjo>
- ITJEN KEMENDIKBUD, Memahami Istilah Endemi, Epidemik, Dan Pandemi <https://itjen.kemdikbud.go.id/covid19/>. Diakses 14 Agustus 2022 Pukul 15.03 WIB.
- Manda Roosa, (29 Januari 2022). Jasa Bangun Dan renovasi Rumah Meningkatkan selama pandemi. Suara Surabaya. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/jasa-bangun-dan-renovasi-rumah-meningkat-selama-pandemi/> Diakses 28 Maret 2023, Pukul 14.27 WIB.
- Rizal Fadli, Mengenal Protokol kesehatan 5 m Untuk Cegah Covid-19. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19>. Diakses 14 Agustus 2022 Pukul 15.45 WIB.
- Wibowo T. Turnardy. Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli.
- Yudha Triarianto Wasono, Penundaan Pekerjaan Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19 (Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19), <https://siplawfirm.id/penundaan-pekerjaan-konstruksi-akibat-pandemik-covid-19-menghadapi-dampak-pandemik-covid-19/>. Diakses 28 Maret 2023 2022, Pukul 14.27 WIB.